

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Kesimpulan dari hasil penelitian adalah sebagai berikut:

1. Opini audit BPK tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Barat. Oleh karena itu, maka H1 ditolak.
2. Ukuran pemerintahan berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Barat. Oleh karena itu, maka H2 diterima.
3. *Leverage* tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Barat. Oleh karena itu, maka H3 ditolak.
4. Opini audit BPK, ukuran pemerintahan, dan *leverage* secara simultan atau bersama-sama tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah. Oleh karena itu, maka H4 ditolak.

#### **5.2 Keterbatasan Penelitian**

Keterbatasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini hanya menggunakan tiga variabel penelitian yaitu opini audit BPK, ukuran pemerintahan, dan *leverage* serta menguji pengaruhnya terhadap kinerja pemerintah daerah.
2. Penelitian ini hanya menggunakan periode pengamatan selama 3 tahun.
3. Hasil penelitian ini kemungkinan tidak sama apabila menggunakan parameter lain karena penulis hanya menggunakan parameter yang penulis pahami.

#### **5.3 Saran**

Berdasarkan keterbatasan yang telah dijelaskan diatas, maka penelitian selanjutnya diharapkan untuk dapat melengkapi keterbatasan dari penelitian ini dengan saran-saran berikut:

- a. Peneliti selanjutnya dapat menggunakan variabel tambahan lain seperti temuan audit BPK, belanja daerah, atau variabel lain yang berhubungan dengan sektor publik sehingga penelitian ini dapat lebih akurat untuk mempresiksi kinerja pemerintah daerah.
- b. Peneliti selanjutnya dapat menambah jumlah sampel penelitian dan menambah periode penelitian sehingga hasil penelitian lebih mampu melihat kecenderungan yang terjadi dalam jangka panjang.
- c. Peneliti selanjutnya dapat menggunakan parameter (alat ukur) lain dalam melakukan penelitian tentang topik ini sehingga hasil penelitiannya dapat dibandingkan dengan penelitian ini.

#### **5.4 Implikasi Penelitian**

Implikasi penelitian adalah akibat langsung dari penemuan suatu penelitin. Penelitian ini menguji pengaruh opini audit BPK, ukuran pemerintahan dan *leverage* terhadap kinerja pemerintahan dengan studi kasus pemerintahan daerah kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2018-2020. Implikasi dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. **Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota**

Pada penelitian ini opini audit BPK tidak berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2018-2020, namun demikian pemerintah daerah tetap diharapkan mempertahankan prestasinya dalam meraih opini audit BPK yang baik dari tahun ketahun. Untuk variabel ukuran pemerintahan, penelitian ini membuktikan bahwa ukuran pemerintahan berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintahan daerah kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Barat. Oleh karena itu, untuk tahun selanjutnya pemerintah

daerah diharapkan mampu meningkatkan ukuran pemerintahan, salah satunya dengan meningkatkan jumlah aset pemerintah daerah. Jumlah aset yang besar memungkinkan pemerintah daerah untuk memiliki sumber daya dan fasilitas yang memadai dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam hal rasio *leverage* dari LKPD pemerintah daerah kabupaten dan kota di Sumatera Barat pada tahun 2018-2020 tidak berpengaruh terhadap kinerja pemerintahan daerah karena rasio utang daerah yang sangat kecil dibandingkan ekuitas dana yang dimiliki. Dengan demikian, pemerintah daerah dapat memfokuskan kepada variabel lain yang dapat meningkatkan kinerja pemerintahan daerahnya.

## 2. Bagi Akademisi

Penelitian ini memberikan wawasan bahwa opini audit BPK dan *leverage* tidak berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2018-2020. Hal ini dapat disebabkan karena opini audit BPK merupakan hasil tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah daerah. Sedangkan kinerja pemerintah daerah diukur dengan rasio efisiensi keuangan daerah. Oleh sebab itu, selama daerah tersebut mengungkapkan laporan keuangan daerah secara wajar, maka opini audit BPK yang diraih akan baik. Hal yang belum tentu berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah.

Selanjutnya untuk variabel *leverage* tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah karena utang setiap daerah sangatlah kecil dibandingkan ekuitas dana yang dimiliki oleh daerah tersebut. Penelitian ini juga memberikan informasi bahwa ukuran pemerintahan berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah karena semakin besar jumlah aset yang dimiliki pemerintah daerah, maka pemerintah daerah lebih mampu memberikan layanan yang semakin baik kepada masyarakat.